



and BALI ANTARA BALI



SEKDA BALI: MASIFKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA





BUPATI BADUNG: VAKSINASI COVID-19 ITU AMAN

Hal. 6



Gubernur Koster Keluarkan SE Perpanjangan PPKM

ubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, yang berisi sejumlah perubahan dibandingkan SE PPKM sebelumnya.

"SE ini dibuat berdasarkan Instruksi Mendagri No 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19," katanya dalam surat edarannya yang diterima ANTARA di Denpasar, Senin.

Menurut dia, dikeluarkannya SE itu juga karena memperhatikan semakin tingginya penularan kasus COVID-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan peningkatan kasus harian COVID-19.

"Perlu bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia," ujarnya.

Dalam SE tertanggal 24 Januari

2021 yang berlaku dari 26 Januari-8 Februari 2021 itu diantaranya mengatur bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali dengan transportasi udara, darat dan laut.

Bagi yang menggunakan transportasi udara waiib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji usap berbasis PCR

paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif tes cepat antigen paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.

nan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji usap berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif tes cepat antigen paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Bagi yang melakukan perjala-

Anak di bawah usia 12 tahun tidak

diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes usap berbasis PCR atau tes cepat antigen.

Surat keterangan hasil negatif tes cepat berbasis PCR dan hasil negatif tes cepat antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan.

Yang berubah dalam SE Perpanjangan PPKM dibandingkan SE No 01/2021 sebelumnya yakni pembatasan kegiatan operasional usaha sampai dengan pukul 20.00 Wita. Sebelumnya operasional usaha pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 21.00 Wita.

"Selain itu, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dilaksanakan

> dengan peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas," ucap Koster. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster (Antaranews Bali/HO-Pem-

Wagub Bali Paparkan Inovasi Pariwisata Hadapi Bencana ke DPD

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati memaparkan inovasi dan langkah-langkah di bidang pariwisata dalam menghadapi situasi kebencanaan kepada Badan Legislasi Urusan Daerah (BLUD) Dewan Perwakilan Daerah.

"Di antaranya telah diterbitkan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali perlu dijaga secara kondusif sesuai dengan visi pembangunan daerah 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' melalui Pola Pembangunan Berencana Menuju Bali Era Baru." kata Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Rabu.

Dalam rapat dengar pendapat secara virtual dengan BLUD DPD itu, dia menyampaikan secara spesifik Perda No 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali itu tidak mengandung penanganan wabah COVID-19 secara khusus,

karena perda disusun tahun 2019 sebelum terjadi pandemi.

"Tetapi, kalau kita perhatikan secara seksama bab demi bab, pasal demi pasal, terutama pada pasal 30 telah diatur tentang kebencanaan meliputi perihal pencegahan bencana, penanganan dan pemulihan pascabencana," ujar Wagub yang akrab dipanggil Cok Ace itu.

Cok Ace mengemukakan di antara isinya menetapkan, pertama kebijakan-kebijakan pencegahan bencana atau keadaan darurat dan pemulihan kepariwisataan budaya Bali dari akibat kebencanaan atau keadaan darurat.

Kedua, kebijakan menyangkut program aksi dan protokol pencegahan, penanganan dan pemulihan dari akibat kebencanaan. Ketiga, hal atau keadaan darurat atau bencana yang disebabkan faktor alam atau non-alam yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan kepariwisataan Bali



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat mengikuti rapat dengar pendapat secara virtual dengan BLUD DPD di Denpasar, Rabu (20/1/2021) (Antaranews Bali/HO-Pemprov Bali)

secara luas.

"Nah. wabah COVID-19 termasuk yang disebabkan nonalam," ucap Cok Ace sembari memaparkan kebijakan-kebijakan maupun program- program yang sudah dilaksanakan Pemprov Bali selama pandemi berlangsung.

Cok Ace yang juga Ketua PHRI Bali itu mengatakan pariwisata yang berkualitas dan mempunyai daya saing dapat dimaknai pariwisata memberikan dampak bagi masvarakat Bali.

"Pariwisata yang tidak merusak, apalagi mematikan sumbersumber daya yang dimiliki Bali, baik keyakinan dan kepercayaan masyarakat, sumber daya manusia maupun sumber daya alam Bali," ujarnya pada rapat yang juga diikuti Perwakilan Wali Kota Bandung dan Kabupaten Soppeng. (ant)

Sekda Bali: masifkan

"Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia"

SEKRETARIS Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di Pulau Dewata untuk memasifkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sebagai upaya penguatan ekonomi pelaku UMKM di tengah kondisi pandemi.

"Karena sudah menjadi gerakan, menjadi tugas kita bersama untuk memberdayakan sumber daya lokal dan potensi lokal dan harus lebih dimasifkan lagi gerakan ini, agar tidak terkesan seremonial, " kata Dewa Indra saat memimpin acara Rakor Dukungan terhadap Gernas BBI di Denpasar, Selasa.

Pemprov setempat, ujar dia, sebelum adanya Gernas BBI juga telah membuat berbagai kebijakan ekonomi untuk pemberdayaan UMKM lokal dan pemerataan kesejahteraan ekonomi, diantaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menyerap 40 persen produk UMKM lokal.

"Kini ketika ada Gernas BBI, sesungguhnya membuat kebijakan di Pemprov Bali menjadi lebih masif," ucap birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng itu.

Pihaknya mendorong pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata mengembangkan hal yang sama terkait pengadaan barang dan jasa, yang memungkinkan UMKM lokal dapat turut mengambil peran.

Selain itu, Pemprov Bali juga sudah mengembangkan e-katalog lokal yang telah diasistensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), Odo R M Manuhutu mengatakan bentuk dukungan terhadap Gernas BBI harus ditunjukkan hingga ke akar rumput, ke desa-desa yang menjadi simpul produksi UMKM.

Selain itu, ujar Odo, pejabat



Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra (kanan) saat berbicara dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marvest Odo RM Manuhutu (kiri) tentang produk lokal dari UMKM Balibell binaan BI Perwakilan Bali dalam Rakor Dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Denpasar, Selasa (26/1/2021).

atau tokoh-tokoh masyarakat harus dapat menunjukkan keteladanan dengan membeli dan menggunakan produk UMKM dalam negeri.

"Tindakan itu selain untuk membangkitkan ekonomi, sekaligus bentuk apresiasi kepada generasi muda yang telah menghasilkan produk-produk berkualitas," ujarnya pada acara yang juga menghadirkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni dan narasumber lainnya secara virtual itu.

Dengan tangan-tangan terampil perajin di Bali, Odo meyakini produk UMKM Bali tidak kalah dengan produk-produk brand ternama dari luar negeri. (ant)

Bulan Bahasa Bali 2021

Padukan Kegiatan Daring-Luring



Ilustrasi - Sejumlah siswa menampilkan teater berjudul "Katemu Ring Tampaksiring" dalam pagelaran seni sastra serangkaian peringatan Bulan Bahasa Bali 2020 lalu. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

PEMERINTAH Provinsi Bali saat pandemi COVID-19 tetap mengadakan Bulan Bahasa Bali yang ketiga kalinya pada 1-28 Februari 2021 sebagai bentuk pemuliaan terhadap bahasa, aksara dan sastra Bali melalui kegiatan yang memadukan konsep acara daring dan luring.

"Bulan Bahasa Bali untuk tahun

ini mengangkat tema Wana Kerthi: Sabdaning Taru Mahottama yang bermakna Bulan Bahasa Bali sebagai Altar Pemuliaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Tertaut Jelajah Pemaknaan Hutan sebagai Prana Kehidupan," kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof Dr I Wayan Kun Adnyana di Denpasar, Minggu.

Oleh karena itu, seluruh isian Bulan Bahasa Bali dipastikan menerjemahkan konsep tema tersebut dari berbagai sumber pustaka lontar, seperti Taru Pramana, Aji Janantaka, terkait Usadha, dan lain-lain.

"Adapun skema isian kegiatan memadukan luring (luar jaringan) dan dengan daring (dalam jaringan), termasuk pergelaran virtual," ujar Kun Adnyana yang juga akademisi ISI Denpasar itu.

Bulan Bahasa Bali, lanjut dia, sekaligus merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Bali No 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Tak jauh berbeda dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali pada tahun-tahun sebelumnya, untuk Bulan Bahasa Bali 2021 akan menyajikan sejumlah agenda acara yang dikemas dalam bentuk Widya Tula (seminar), Kriya Loka (lokakarya), Prasara (pameran), Wimbakara (lomba), Utsawa (fes-

tival), Sesolahan (pergelaran), dan pemberian penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahottama.

Untuk Widya Tula (seminar) akan mengangkat enam topik yakni Kalimosaddha, Widyosadha, Sastra Panaweng Gering, Usadhi Pranawa, Usadhikanda dan Dharma Usadha.

Sedangkan kegiatan Kria Loka (loka karya) akan menghadirkan enam narasumber dengan mengangkat tiga materi yakni Pangenter Acara (Pembawa Acara), Ngreka Baligrafi, dan Ngracik Loloh. Kemudian Prasara (pameran) akan melibatkan 60 seniman prasi lintas generasi. Ini merupakan pameran karya seni prasi terbesar di Bali.

"Jika pada Bulan Bahasa Bali tahun-tahun sebelumnya ditandai dengan Utsawa (festival) Nyurat Lontar, maka untuk tahun ini terkait kondisi pandemi COVID-19, diisi dengan festival Gita Pangrastiti Pamahayu Jagat Ngider Bhuwana," ucap Kun Adnyana. (ant)

PPKM di Denpasar Diperpanjang Hingga 8 Februari

elaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Denpasar, Bali diperpanjang dua minggu mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

"Pemkot Denpasar resmi memperpanjang PPKM dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari 2021 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat dikonfirmasi di Denpasar, Senin.

Dalam surat tersebut, tidak ada perubahan teknis maupun aturan PPKM dari sebelumnya. Hanya sedikit perbedaan aturan PPKM dalam surat tersebut, yakni peraturan dari pusat mengadakan pelonggaran jam operasional yang awalnya sampai pukul 19.00 WIB menjadi

pukul 20.00 WIB.

"Terkait dengan pelonggaran yang dilakukan pemerintah pusat, Pemkot Denpasar masih konsultasi ke Gubernur

Bali untuk memastikan dilonggarkan kembali atau tetap," katanya.

Ia menambahkan dari lima kabupaten/kota di "Pulau Dewata" itu, yang menerapkan PPKM ini juga harus seragam.

Saat ini, jam operasional tempat usaha di Denpasar masih tetap hingga pukul 21.00 Wita.

"Dalam PPKM tersebut, Pemkot Denpasar kembali mengerahkan Satgas COVID-19 untuk melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang



Tim Yustisi Denpasar jaring pelanggar prokes (ANTARA/I Komang Suparta/Ist/2020)

membandel supaya tutup tepat waktu sesuai dengan waktu yang dijadwalkan," ujarnya.

Ia berharap, dengan diperpanjang PPKM, masyarakat semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna menekan penularan COVID-19. Pembatasan itu, kata dia, dilakukan untuk mengurangi adanya kerumunan orang yang berbelanja sehingga, pengurangan waktu buka tempat usaha tersebut dianggap cukup efektif mencegah penyebaran COVID-19. (ant)

Denpasar Sidak Protokol Kesehatan

di 16 Pasar Tradisional



Pemkot Denpasar terus berupaya menekan kasus COVID-19 yang masih berfluktuatif di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 16 pasar tradisional, Minggu (24/1/2021). (Foto Antara News Bali/Nyoman Hendra/2021)

PEMKOT Denpasar terus berupaya menekan kasus COVID-19 yang masih fluktuatif di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 16 pasar tradisional, Minggu.

"Sebagai salah satu sektor esensial, pasar tradisional masih tetap beroperasi saat penerapan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, Ida Bagus Kompyang Wiranata.

Selama penerapan PPKM yang dimulai sejak Senin (11/1), kegiatan di pasar tradisional masih diizinkan untuk beroperasi dengan pengawasan dan penerapan disiplin Protokol Kesehatan

yang ketat

Pasar Tradisional yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar juga tetap dilakukan pengawasan dan sidak kepada pedagang dan pengunjung pasar untuk mencegah kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan.

Menurut dia, penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas sehingga upaya penekanan penyebaran COVID-19 dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan holistik.

Perumda Pasar Sewakadarma yang menaungi 16 pasar tradisonal di Denpasar itu telah membentuk Satgas COVID-19 di masing-masing pasar untuk memaksimalkan penerapan disiplin protokol kesehatan.

"Setiap pasar sudah ada Satgas COVID-19 dan secara rutin melakukan sidak penerapan protokol kesehatan dan mengirimkan laporan rutin ke Perumda Pasar Sewakadarma," ujarnya. Ia menambahkan secara umum baik pedagang dan pengunjung pasar sudah memiliki kesadaran dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan, kendati tidak dipungkiri masih ditemukan pelanggaran.

Berdasarkan data Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar pada Minggu (24/1) terkait pelaksanaan Sidak Disiplin Prokes di 16 pasar tradisional, tercatat pelanggaran tertinggi hanya sebanyak tujuh orang dalam satu pasar, yakni di Pasar Ketapian yang terdiri atas lima pengunjung dan dua pedagang yang melakukan pelanggaran.

"Jadi pelanggarannya rata-rata tidak memakai masker dengan benar, namun pada prinsipnya telah membawa masker dengan pelaksanaan PPKM dan pengawasan ini untuk kesadaran masyarakat supaya lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan," katanya. (ant)

Wali Kota Denpasar Jadi Penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Pusat telah menetapkan 10 nama Bupati/ Wali Kota yang terpilih untuk meraih Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 pada acara puncak Hari Pers Nasional 2021 di Jakarta, Selasa (9/2), termasuk diantaranya Wali Kota Denpasar.

Ketua Tim Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Nungki Kusumastuti mengatakan Bupati/ Wali Kota terpilih, masingmasing memiliki strategi jitu dalam memajukan kebudayaan daerah-nya.

"Misalnya, dalam menghadapi gejala umum bahwa kaum milenial kurang menyukai kebudayaan daerah. Bagian pelik itu, kemudian dijawab oleh para Bupati/ Wali Kota dengan strategi berbeda-beda, dalam

mengolah kekuatan dan warisan kekayaan masa lalu dengan cara-cara masa kini, termasuk penggunaan teknologi dunia maya.

Dengan begitu, daerah tidak menerima pengaruh global begitu saja, tetapi turut mewarnainya," ujar Nungki di Jakarta, Jumat.

Nungki bersama anggota juri yang lain, yakni wartawan senior Ninok Leksono, pengamat seni budaya/penulis Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI

Pusat

Atal S Depari, wartawan senior kebudayaan/ pelaku seni Yusuf Susilo Hartono, terlibat sejak dalam tahap awal

> kegiatan itu. Mulai dari perencanaan hingga pembacaan dan penilaian berkas

dalam rentang waktu Oktober 2020 hingga Januari 2021. Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengatakan rencananya trofi dan piagam penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 akan diberikan kepada 10 Bupati/ Wali Kota

proposal dari berbagai daerah

500 halaman, belum termasuk

berbagai tautan yang ada, juga

berdurasi total ratusan menit,

wawancara langsung via daring

melakukan verifikasi, hingga

menyimak video yang disertakan

yang masuk ke panitia lebih dari

disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. (ant)

tersebut secara daring dan

Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

DPMPTSP Denpasar Layani Perizinan Ribuan UMKM Secara Daring



Petugas melayani warga yang mengurus surat perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma, Denpasar, Bali. (Foto Antara News Bali/Nyoman Hen-

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, Bali, melayani animo masyarakat untuk membangun usaha di tengah pandemi COVID-19 yang tidak surut sehingga geliat ribuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu dilayani dengan perizinan secara "online" (daring).

"Sebanyak 2.713 izin UMKM telah diterbitkan dari bulan

Januari-Oktober 2020 melalui layanan online bernama One Stop Service (OSS). Angka tersebut tidak termasuk perizinan non-UMKM sejumlah 3.973 izin," kata Kepala DPMPTSP Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus, saat dikonfirmasi di Denpasar, Minggu.

Ia menielaskan bahwa selama pandemi COVID-19 mewabah sejak bulan Maret 2020, DPMPTSP

Kota Denpasar tetap membuka layanan berbasis online. Kendati beroperasi secara normal, namun penerapan protokol kesehatan tetap dijaga ketat.

Selain pelayanan perizinan resmi, DPMPTSP juga turut membidangi perizinan UMKM yang sebelumnya ditangani di masingmasing kecamatan. Namun, kini melalui layanan One Stop Service (OSS) pelayanan perizinan UMKM dapat dilaksanakan secara online/daring.

"Jadi, sekarang sudah satu pintu di DPMPTSP, sehingga pelaku UMKM dapat dengan mudah memperloleh perizinan," ujarnya.

Geliat UMKM di Kota Denpasar terus mengalami pertumbuhan di masa pandemi COVID-19. Selama periode bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2020 tercatat pengajuan perizinan UMKM sebanyak 2.713 pengajuan. Angka tersebut diluar perizinan no-UMKM yang jumlahnya mencapai 3.973 izin.

"Dahulu untuk perizinan UMKM yang modalnya dibawah Rp50 Juta dapat dilaksanakan di kecamatan, namun sekarang melalui One Stop Service (OSS) secara online sudah bisa, dan pada tahun 2020 kita menerbitkan 2.713 izin UMKM," ujarnya

Ia menambahkan bahwa dengan masih banyaknya masyarakat Kota Denpasar yang mengajukan perizinan memberikan gambaran bahwa iklim investasi di ibukota Provinsi Bali ini tetap stabil.

Dengan bergeraknya iklim investasi diharapkan memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19

"Tentunya kami kembali mengingatkan kepada wirausaha Kota Denpasar untuk selalu melengkapi diri dengan perizinan, hal ini menjadi modal penting baik secara administrasi maupun permodalan kedepannya," katanya. (ant)

Badung Mulai Siapkan Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026

emerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali mulai melakukan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana (SB) tahun 2021-2026.

"Dalam penyusunan RP-JMD ini diperlukan sinergi dan sinkronisasi dari perangkatperangkat daerah yang terkait sehingga tinggal melanjutkan dan memperbaiki RPJMD yang ada sebelumnya," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangan resmi dari Humas Badung yang diterima di Mangupura, Jumat.

Dalam penyusunan RPJMD tersebut, pihaknya meminta agar kelompok kerja yang ada dapat berproses untuk dapat bekerja lebih baik karena pada prinsipnya siapapun dan dimanapun ditugaskan dapat melakukan tugas dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab.

"Saya minta juga kelompok kerja melakukan breakdown jadwal kegiatannya di dalam pokja masing-masing. Saya percaya bahwa kami saling membutuhkan antara pokja satu dan yang lainnya serta perangkat-perangkat daerah yang lain dan RPJMD adalah dokumen daerah yang sifatnya vertikal yang artinya harus kami selaraskan dengan dokumen nasional," katanya.

Selain itu, Wabup Suiasa menjelaskan, pihaknya juga berharap agar nantinya dokumen tersebut dapat menjabarkan lebih jauh visi dan misi Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung terpilih.

"Kami tidak berpikir dari nol. Mari lanjutkan apa yang sudah ada, kami evaluasi dan perbaiki yang sebelumnya. Saya juga akan sebisa mungkin dapat mengikuti rapat tiap-tiap kelompok kerja," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Badung, Made Wira



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kanan). ANTARA/HO-Humas Badung

Dharmajaya menjelaskan, sesuai perintah undang- undang, proses pengajuan dan penetapan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi peraturan daerah RPJMD selambat- lambatnya enam bulan setelah dilantik.

"Kami sudah merancang tim penyusun dan saat ini sedang tahap proses di Bagian Hukum. Secara regulasi, penyusunan RP- JMD berpijak pada dasar hukum yang berlaku," ujarnya.

Regulasi tersebut diantaranya mulai dari tata cara perencanaan yang masih tetap merujuk Permendagri No.86 tahun 2020 dan perkembangan terakhir terhadap perubahan- perubahan aturan berkenaan dengan keuangan daerah dan berkaitan dengan penyusunan RPJMD. (adv)

Bupati Badung: Vaksinasi COVID-19 itu Aman



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjalani vaksinasi COVID-19 di UPTD Puskesmas Abiansemal I, Jumat (15/1). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

BUPATI Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, menjadi pejabat pertama di wilayah Badung yang menjalani vaksinasi dengan suntikan vaksin yang diproduksi Sinovac sebagai salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 itu aman. "Secara pribadi saya ingin menjadi contoh dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman sehingga tidak ada lagi interpretasi di warga dan masyarakat apalagi di media sosial ada yang mengatakan a, b dan seterusnya tentang vaksin ini," ujar Bupati Giri Prasta di UPTD Puskesmas Abiansemal I, Badung, Jumat.

Dalam pelaksanaan vaksinasi itu, setelah disuntik vaksin COVID-19 Sinovac dan menjalani observasi selama 30 menit, Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa dirinya merasa baik-baik saja dan tidak mengalami keluhan sedikit pun.

"Saya tidak merasakan keluhan apapun setelah disuntikkan vaksin. Ini sebagai bukti kalau vaksin ini sangat aman. Jadi masyarakat jangan ragu dan takut lagi untuk divaksin, karena ini tujuannya untuk memperkuat imun, sehingga semua bisa segera bangkit dari pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya meminta agar seluruh masyarakat Badung dapat mengedepankan semangat persatuan dan kebersamaan dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini.

"Kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat terutama kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan program vaksin COVID-19 gratis yang diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia," ungkap Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Badung I Nyoman Gunarta menjelaskan, pada 13 Januari lalu, pihaknya dibantu oleh Polres Badung telah mendistribusikan vaksin ke masingmasing fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar.

"Kemarin ada 105 orang yang sudah mendapatkan vaksin, kemudian di hari Jumat ini terdaftar 127 orang penerima vaksin di 10 fasilitas kesehatan yang akan mengadakan vaksinasi. Mudahmudahan semua bisa berjalan lancar," katanya. (adv)

Pemkab Badung Minta Pegiat Medsos Sebarkan Informasi Pemerintah

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, berharap para pegiat media sosial di wilayah tersebut untuk membantu memperluas persebaran informasi program-program pemerintah hingga ke masyarakat yang paling bawah.

Dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Senin, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Bagian Humas Badung Made Suardita juga telah bertemu dan menjalin komunikasi dengan para penggiat media sosial yang tergabung dalam "The Netizen Badung".

"Selain memperluas informasi program-program Pemkab Badung kepada masyarakat, kehadiran penggiat media sosial ini dapat menjadi jembatan penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah melalui konten-konten menarik sesuai dengan ciri khas akun

media sosial anggota The Netizen Badung," ujar Ketut Suiasa.

Pihaknya mengapresiasi para penggiat media sosial yang telah ikut serta dalam mempromosikan potensi yang dimiliki Badung di bidang pariwisata, kuliner, UMKM di masa pandemi COVID-19 ini.

Namun ia juga mengingatkan agar informasi-informasi yang disampaikan pegiat media sosial harus benar-benar akurat dan ielas serta tidak menyesatkan.

"Di era digital saat ini, siapapun bisa mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan mudah. Dampaknya, masyarakat semakin sulit memilah informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang menyesatkan. Untuk itu saya berharap pegiat medsos dapat menyampaikan informasi yang mencerahkan dan tidak menyesatkan," ungkap Wabup



Wabup Badung I Ketut Suiasa didampingi Kabag Humas Badung Made Suardita. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Sementara itu, Kabag Humas Badung Made Suardita menjelaskan bahwa ke depannya Pemkab Badung akan tetap bekerja sama dengan pegiat media sosial atau media daring dalam menyebarluaskan informasi tentang program-program

pemerintah.

"Melihat saat ini kecepatan informasi sangat diperlukan, selain bekerja sama dengan media cetak, kami juga akan tetap bekerja sama dengan penggiat media sosial dan media daring lainnya," ujarnya. (adv)

Sekda Badung Ingatkan

Integritas Kelola Hibah Pariwisata



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa (kiri) dan Plt. Kadis Pariwisata Badung, Cokorda Raka Darmawan. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa mengingatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk selalu menunjukkan integritas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana hibah pariwisata tahun 2020 yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

"Tolong kepada teman-teman perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, pastikan dokumennya dan fotofotonya lengkap sehingga terlihat kerjanya bertanggungjawab. Tunjukkan bahwa kita benar-benar memiliki integritas dan bertanggungjawab terhadap dana hibah yang sudah diberikan oleh

pemerintah pusat," ujar Sekda Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, kunci keberhasilan dan kecepatan pelaporan sangat tergantung kepada pimpinan perangkat daerah dan termasuk wajib pajak yang menerima hibah pariwisata tersebut.

"Saya berharap secepatcepatnya dapat kami eksekusi sehingga dari segi pertanggungjawaban kita aman dan kami menunggu hasil laporan kita kepada Kementerian Keuangan," katanya.

Untuk itu, ia juga meminta kepada pihak Inspektur untuk dapat bergerak cepat dan dilakukan secara pararel sehingga akhir bulan ini sudah selesai melakukan semua pertanggungjawabannya.

"Format terkait pelaporan ini menjadi kunci penting dalam rangka untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti. Kami harus antisipasi sehingga apapun tahapan- tahapan yang dilakukan dan termasuk mungkin berapa realisasi yang telah dilakukan tolong disampaikan sejelas- jelasnya. Saya pastikan akhir bulan ini sudah selesai semua," ungkap Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu, Plt. Kadis Pariwisata Badung, Cokorda Raka Darmawan mengatakan, pemerintah daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari mendatang.

Menurutnya, kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan laporan juga telah dipersiapkan oleh perangkat daerah sehingga tidak perlu menunggu batas akhir karena masih banyak tugas-tugas lain yang perlu diselesaikan.

Cokorda Raka Darmawan menambahkan, laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan juga harus dilakukan review dulu oleh pihak Inspektorat. (adv)

DLHK Badung Terus Lakukan "Bersih-Bersih" Sampah Kiriman di Pantai

DINAS Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, Bali, terus melakukan "bersih-bersih" untuk penanganan terhadap sampah kiriman yang dibawa arus gelombang laut ke tepi pantai yang terdampar di berbagai kawasan pantai di wilayah itu.

"Kegiatan bersih-bersih pantai ini terus dilakukan karena sekarang ini musimnya sampah-sampah kiriman dengan volume yang banyak dan membutuhkan penanganan yang serius dan profesional," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan perhatian dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menangani fenomena angin barat yang membawa sampah kiriman ke berbagai titik pantai di sepanjang wilayah Badung.

Menurutnya, dengan penanganan yang optimal tentu juga

dapat memberikan kesan positif terhadap citra kawasan pantai seperti Pantai Kuta, Seminyak dan Legian yang merupakan objek wisata yang sudah dikenal di mancanegara serta tentunya akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung pada saatnya nanti.

"Kami juga berharap dalam penanganan sampah kiriman ini tidak saja mengandalkan dari pihak pemerintah saja tapi juga diperlukan partisipasi dan keterlibatan semua pihak dalam mendukung kegiatan bersih pantai," katanya.

Sekda Adi Arnawa juga telah memantau langsung kesiapan DLHK Badung di lapangan dalam penanganan permasalahan sampah, tidak saja dari segi tenaga tetapi bagaimana operasionalnya terkait kesiapsiagaan menghadapi sampah kiriman tersebut.

"Dengan kondisi volume sampah yang banyak ini, kami membutuhkan alat-alat yang be-



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

rat cukup banyak karena bisa menambah dan menunjang dalam rangka penanganan sampah di Pantai Kuta sehingga bisa maksimal dan optimal," ungkapnya.

Pihaknya juga mengapresiasi dan terus memberikan memotivasi kepada tenaga- tenaga kebersihan dan petugas, yang telah bersama-bersama menangani permasalahan sampah kiriman.

"Kami juga mengingatkan kepada petugas kebersihan dalam penanganan sampah ini untuk tetap melaksanakan dan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, terutama selalu menggunakan masker walaupun dalam kondisi yang cukup berat ini," ujarnya. (adv)

Badung Ikuti Pembahasan Proyek Jalan Lingkar Selatan Secara Virtual



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa didampingi tim Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Badung mengikuti rapat pembahasan Project Development Facility (PDF) secara virtual proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Jalan Lingkar Selatan dengan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerin-

tah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu, PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dan para konsultan terkait.

"Kami Pemkab Badung menyampaikan terima kasih kepada Kemenkeu dan PT. PII atas dukungan demi terwujudnya proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan, mengingat proyek ini sangat strategis dan telah tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Badung tahun 2016-2021," ujar Sekda Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan, pembangunan Jalan Lingkar Selatan tersebut diproyeksikan untuk mempermudah konektivitas pariwisata di wilayah Badung selatan mengingat Badung merupakan pintu gerbang utama pariwisata pulau Bali.

Badung juga menjadi tujuan penyelenggaraan berbagai kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) berskala internasional sehingga diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai.

"Pembangunan Jalan Lingkar Selatan ini dalam rangka membangun pariwisata Badung yang berkelanjutan sekaligus membuka kawasan pariwisata baru dan mengurangi kemacetan di wilayah Badung selatan," katanya.

Mengingat Kabupaten Badung baru pertama kali melaksanakan proyek dengan sistem KPBU, Sekda Adi Arnawa mengharapkan dukungan dari Kementerian Keuangan serta semua pihak yang terlibat, sehingga proyek KPBU ini bisa berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang ada.

Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kemenkeu sangat berarti mengingat kondisi Badung yang mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata yang saat ini sedang terpukul dan terdampak pandemi COVID-19.

"Tentu dengan adanya dukungan dari Kemenkeu dalam Proyek JLS ini dengan melibatkan pihak ketiga, kami berharap proyek ini bisa dilaksanakan sesuai harapan bersama. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kami bisa bangkit kembali untuk memenuhi segala kewajiban dalam proyek KPBU ini," ungkapnya. (adv)

Pemkab Badung Bangun Puskesmas Induk di Kuta Selatan

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, berkomitmen untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang kesehatan berupa Puskesmas induk untuk wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Badung.

"Kami akan terus berproses untuk mewujudkan infrastruktur kesehatan di Kuta Selatan. Karena ini sudah menjadi wacana dari dulu dan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Jumat.

Saat ini, katanya, di wilayah Kuta Selatan hanya terdapat satu Puskesmas induk sedangkan apabila melihat demografi wilayah dan penduduk, idealnya wilayah Kuta Selatan itu memiliki tiga Puskesmas induk dan satu rumah sakit

Untuk itu, Pemkab Badung berkomitmen dalam waktu dekat membangun Puskesmas induk guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat

"Memang infrastruktur sektor kesehatan di Kuta Selatan, masih minim khususnya infrastruktur Puskesmas induk. Secara demografis di Kuta Selatan, untuk layanan Puskesmas induk kami butuh tiga buah. Sementara ini hanya ada satu di Desa Adat Peminge," katanya.

Wabup Suiasa juga telah turun ke lapangan meninjau lahan rencana pembangunan Puskesmas yang merupakan fasilitas sosial dari Perumahan Permata Nusa Dua di Kelurahan Benoa. Pihaknya akan mengambil langkah cepat untuk segera membangun Puskesmas induk yang baru.

Terkait lahan dengan luas sekitar 34 are dengan lokasi yang cukup representatif tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"Kami kira lahannya cocok, nanti kami bicarakan lebih lanjut karena lahan ini masih merupakan Hak Pengelolaan (HPL) dari ITDC, perlu kami komunikasikan agar tidak ada permasalahan dan



Wabup Badung I Ketut Suiasa meninjau rencana lahan untuk Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan, Jumat (22/1). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

tempat ini dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan," ungkap Wabup Suiasa.

Ia menambahkan, sebenarnya pihaknya juga telah melakukan komunikasi secara lisan dan pada dasarnya tidak ada permasalahan yang prinsip serta tinggal dilaksanakan secara administratif.

"Ini on the track akan diselesaikan, sehingga fasilitas sosial ini nanti sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif kami akan selesaikan dan kami pastikan tempat ini sangat relevan dibangun Puskesmas Induk Kuta Selatan," ujar Wabup Suiasa. (adv)

KPU Tetapkan Giri Prasta-Suaisa Kembali Pimpin Badung



Penetapan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Badung. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung, Bali, secara resmi menetapkan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa kembali memimpin sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Badung tahun 2020.

"KPU Kabupaten Badung men-

etapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020 yaitu pasangan calon atas nama I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dengan perolehan suara sebanyak 285.241 suara atau 94,63 persen dari total suara sah sebanyak 301.413," ujar Ketua KPU Badung I Wayan

Semara Cipta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Minggu.

Dalam Pilkada Badung tahun 2020, pasangan petahana I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa menjadi pasangan calon tunggal melawan kotak kosong.

Wayan Semara Cipta mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pilkada Badung tahun 2020 dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak tahun 2020.

Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu juga telah dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Badung Nomor : 089/PL.02.7-BA/5103/KPU-BADUNG/1/2021.

"Dalam Pilkada Badung 2020, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tercatat sebanyak 84,62 persen dan ini merupakan angka partisipasi tertinggi selama kurun waktu 15 tahun terakhir,"

Sementara itu, Calon Bupati Badung terpilih I Nyoman Giri Prasta mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan, menjaga keamanan dan ketertiban proses Pilkada Badung tahun 2020, sehingga jalannya proses demokrasi itu dapat berjalan aman, tertib, dan terkendali.

"Proses demokrasi berjalan tertib, dan lancar. Terima kasih kepada warga Badung yang telah menggunakan hak suaranya dengan tetap menjaga situasi kondusif di wilayah Kabupaten Badung yang juga sesuai protokol kesehatan COVID-19," ungkapnya. (adv)

Pemkab Apresiasi Masyarakat Badung Ikut Bersihkan Sampah Pantai

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mengapresiasi berbagai komponen masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih sampah di sejumlah titik kawasan pantai di wilayah itu.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat yang turut berpartisipasi secara bersama-sama melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan di sepanjang kawasan pantai," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Pantai Petitenget, Badung, Minggu.

Ia menjelaskan fenomena sampah kiriman yang terbawa arus dan terdampar di pantai memang terjadi setiap tahun di wilayah Badung pada periode sekitar bulan Oktober hingga Februari.

"Fenomena tersebut kami sebut kedaruratan sampah, karena setiap harinya hampir sebanyak 150-200 ton sampah di sepanjang pantai ini yang terus dibersihkan," katanya.

Hal itu selama ini juga sudah

menjadi perhatian serius dari seluruh jajaran Pemkab Badung dalam upaya menjaga citra Bali dan Badung khususnya sebagai daerah tujuan wisata.

Menurut Suiasa, penanganan sampah sangat perlu dilakukan mengingat kebersihan disamping kesehatan, merupakan isu yang sangat strategis dalam mendukung kenyamanan wisatawan dan menjadi tantangan pemerintah tiap tahun.

"Namun, untuk mengatasinya tidak bisa dilakukan pemerintah saja dan diperlukan dukungan dan partisipasi semua komponen masyarakat untuk dalam mengatasi fenomena sampah kiriman ini. Untuk itu, kami mengajak partisipasi dari semua elemen masyarakat ikut mengatasi masalah sampah di sepanjang pantai wilayah Badung," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, aksi bersih sampah dilakukan oleh Civitas Akademika Universitas Dwijendra Bali. Pada waktu yang bersamaan, Organisasi Amatir



Relawan membersihkan sampah yang berserakan saat mengikuti aksi bersih sampah di Pantai Kuta, Badung, Bali, beberapa waktu yang lalu. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

Radio Indonesia (Orari), RAPI dan komunitas hotel di Bali juga melakukan aksi bersih sampah di Pantai Dreamland Pecatu.

Sementara itu, Rektor Universitas Dwijendra, Gede Sedana menjelaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti dengan aksi bersih sampah tersebut ini merupakan bagian dari Tri

Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan penelitian.

"Kami akan selalu bersamasama bersinergi dengan pemerintah khususnya Pemkab Badung. Tidak hanya sebatas kegiatan bersih pantai, tapi kegiatan lain khususnya dalam mendukung berbagai program dari pemerintah," ujarnya. (adv)

Pemkab-Kejari Badung Kerja Sama Pendampingan Investasi di Daerah



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat menerima Kejari Badung Ketut Maha Agung di Mangupura, Badung, Senin (25/1). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten

Badung, Bali, menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Badung dalam hal pendampingan kegiatan investasi sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan investasi di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

"Melalui kerja sama ini kami

berkomitmen untuk menciptakan dan menjaga iklim usaha atau investasi yang kondusif di wilayah kami," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Badung, Senin.

Ia mengatakan juga ingin investor terlindungi dan hak-haknya secara hukum yang dijamin oleh negara, sekaligus agar ada kepas-

tian hukum bagi investor sesuai aturan berlaku.

Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Badung itu diyakini juga akan mempermudah realisasi investasi karena kemudahan realisasi investasi diperlukan oleh Pemkab Badung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki Badung.

"Komitmen ini yang harus kami jaga bersama, kami berterima kasih atas dukungan yang sangat kuat dari jajaran Kejari Badung," kata Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Kepala Kejari Badung Ketut Maha Agung mengatakan, kejaksaan mempunyai program di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bisa melakukan pendampingan lewat legal of opinion terkait persoalan investasi.

"Kami bisa melakukan kegiatan

pendataan dan pendampingan. Pada dasarnya kami mendukung langkah Pemkab Badung untuk mewujudkan investasi tanpa ada masalah," ungkapnya.

Menurut dia, jaminan pengamanan akan mendukung keberhasilan investasi baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil investasi.

Selain itu, kerja sama itu juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam rangka mensukseskan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, guna menciptakan dan menjaga iklim investasi Indonesia agar tetap kondusif dalam rangka mendorong terwujudnya visi menjadikan Indonesia maju.

"Oleh karena itu, kami mendukung kebijakan Pemkab Badung untuk bersama-sama membangun sistem dalam mempermudah kegiatan investasi di Badung," ujar Ketut Maha Agung. (adv)

Dishub Gianyar Alihkan

Uji KIR ke Sistem Elektronik

KADIS Perhubungan Kabupaten Gianyar I Wayan Suamba menjelaskan saat ini sedang terjadi transisi atau peralihan sistem dari KIR manual ke sistem elektronik yang bernama BLUe (Bukti Lulus Uji elektronik), setelah para sopir mengeluh terkait keterlambatan pelayanan.

"Banyak sopir yang mengeluhkan kok sekarang pelayanannya lama? kami sedang menginput data setiap kendaraan yang mau uji KIR untuk memulai sistem BLUe karena mulai Januari 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar mulai menerapkan sistem elektronik," ujar Kadishub Suamba, dalam keterangan pers Diskominfo Gianyar, Sabtu.

Ia menambahkan setelah nanti seluruh kendaraan masuk dalam database maka pelayanan KIR dengan sistem elektronik akan lebih cepat.

"Nanti setelah semua kend-

araan masuk database sava vakin pelayanan akan jauh lebih cepat," lanjutnya.

Untuk itu, Kadishub mengimbau dan memohon permakluman kepada para supir atas keterlambatan proses uji KIR serta mendukung proses penginputan data kendaraan agar nantinya proses uji KIR dapat dilakukan lebih cepat serta menghindari permainan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Uji KIR berbasis elektronik BLUe menggantikan bukti lulus uji KIR yang dulunya berbentuk buku. BLUe terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC.

Data seperti identitas kendaraan, foto fisik kendaraan dari empat sisi, hingga data hasil pengujian berkala disimpan dalam



Uji KIR di Dinas Perhubungan Gianyar (Foto Humas Gianyar)

format digital. Data-data tersebut dapat diakses dengan memindai QR Code pada stiker hologram. Bisa juga dengan menempelkan smart card ke smartphone yang sudah memiliki fitur NFC.

Digitalisasi data hasil uji KIR ini diharapkan dapat meminimalisir praktik pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji berkala

yang kerap dilakukan pada kendaraan angkut. Untuk itu, jika terjadi perubahan bentuk pada bak angkut maka pelayanan akan dikesampingkan dan mengedepankan yang lainnya. Tujuannya agar permasalahan yang dialami satu kendaraan tidak menghambat pelayanan pada kendaraan lainnya. (ant)

Wakil Bupati Bangli Buka Musyawarah PMI



an program penguatan penanggulangan Covid-19 kepada 10 desa di Kabupaten Bangli (Dok Humas)

WAKIL Bupati Bangli yang juga Ketua PMI Kabupaten Bangli Sang Nyoman Sedana Arta membuka Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) PMI Kabupaten Bangli tahun 2021 di ruang pertemuan Dinas PKP Kabupaten Bangli, Rabu.

Dalam acara itu, Ketua Pengurus PMI Provinsi Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Sekretaris PMI Provinsi Bali DR. Made Wiryani, SH., MH., menyampaikan harapan agar program yang disusun terdapat adanya sinergitas program antara PMI Provinsi dan PMI Kabupaten Bangli sehingga pelaksanaan program dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan.

Sampai pandemi COVID-19 saat ini, PMI di seluruh

Indonesia masih melakukan respons mulai dari pelaksanaan spraying disinfektan, promosi edukasi pencegahan penyebaran COVID-19, distribusi masker dan paket PHBS (pola hidup bersih dan sehat) sampai dengan evakuasi atau rujukan pasien COVID-19.

Untuk pelaksanaan itu, dukungan dari semua pihak sangat diharapkan agar kegiatan respons bencana yang dilaksanakan PMI Provinsi Bali, baik tingkat daerah maupun secara nasional dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknva.

Pihaknya juga tidak lupa menyampaikan bahwa berbicara mengenai organisasi PMI, tentu tidal lepas dengan keberadaan Unit Donor Darah (UDD) PMI yang melaksanakan tugas pelayanan donor. Pada masa pandemi, UDD telah melaksanakan donor untuk Terapi Plasma Konvalesen (TPK) bagi pasien COVID-19.

Untuk kedepannya diharapkan UDD agar dapat terus melaksanakan peningkatan

kegiatan donor, peningkatan mutu dan keamanan darah serta memberikan pelayanan darah yang lebih maksimal kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangli yang juga Ketua PMI Kabupaten Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang besar dan diakui dunia, maka Palang Merah Indonesia telah dapat melaksanakan tugas pokoknya di bidang kemanusiaan dalam meringankan penderitaan sesama melalui berbagai program kegiatan dari tingkat pusat hingga ke daerah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan.

Salah satu tugas pokok PMI adalah membantu dalam penanganan musibah dan bencana di dalam dan di luar negeri. Dalam kondisi prihatin bangsa sekarang ini, peranan PMI sangat dibutuhkan membantu pemerintah dalam penanganan bencana Pandemi COVID-19 dan bencana alam yang banyak terjadi akhir-akhir ini. (ant)

Bupati Tabanan Luncurkan Program "Kopi Pewarta" |

BUPATI Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti meluncurkan secara resmi Program Kopi Pewarta yang digagas oleh Pewarta Kabupaten Tabanan secara virtual atau melalui zoom meeting, Senin.

Ketua Pewarta Tabanan Donny Darmawan mengatakan, Kopi Pewarta adalah singkatan dari Komunikasi Penuh Inspirasi yang inovasinya akan dipublikasikan oleh Pewarta.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang penuh inspirasi menyampaikan gagasan-gagasan inovatif, menyampaikan inovasi-inovasi terbaru dalam membangun

"Mereka adalah orang-orang yang inspiratif, baik dari kalangan Pemerintah Daerah maupun kalangan di luar Pemerintah Daerah, seperti pihak ekskutif, legislative, Forkopimda, OPD, tokohtokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan masyarakat Tabanan itu

sendiri," ujar Donny.

Hasil dari Kopi Pewarta ini akan disajikan dalam bentuk sebuah berita yang disampaikan dalam media online dan Fanfage yang dimiliki oleh Pewarta, sehingga hasil dari Kopi Pewarta ini dapat dicerna oleh masyarakat luas, guna menjadikan Tabanan yang lebih baik kedepan.

"Atas dasar itulah, kami mohon Ibu Bupati Tabanan disaksikan tokoh lainnya meluncurkan Kopi Pewarta ini, sekaligus kami meminta kepada Ibu memberikan sambutan. Juga kepada Bapak Wakil Bupati yang notabenanya akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Tabanan. Kami mohon arahan dan motivasi," kata Donny.

Bupati Eka mengatakan tren perkembangan kasus COVID-19 secara nasional maupun di Tabanan, tentunya harus lebih meningkatkan komunikasi dan jalinan koordinasi serta inovatif, untuk memberikan arahan ke-



Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti meluncurkan secara resmi Program Kopi Pewarta yang digagas oleh Pewarta Kabupaten Tabanan secara virtual atau melalui zoom meeting, Senin (25/1/2021). (Antara News Bali/Pande Yudha/2021)

pada masyarakat Tabanan dalam menjaga protokol kesehatan.

"Tidak henti-hentinya harus digaungkan karena kita melihat dengan meningkatnya kasus ini, juga terlihat bahwa kesadaran masyarakat dan keinginan masyarakat mematuhi protokol kesehatan belum maksimal," ujarnya.

Bupati Eka berharap komu-

nikasi Pemkab Tabanan dengan Pewarta tetap sejalan dalam menyosialisasikan protokol kesehatan maupun programprogram positif dari pemerintah kepada masyarakat dan tetap mengimbau agar tetap menjaga imun tubuh. Juga tidak lupa menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin tanpa melanggar protokol kesehatan. (ant)

Tabanan Luncurkan "Blue Card" untuk Uji Kendaraan Bermotor Secara Elektronik



Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, Bali, meluncurkan sistem pengujian kendaraan bermotor secara "Blue Card" (Bukti Lulus Secara Elektronik) di Kantor Dinas Perhubungan setempat, Selasa (19/1/2021). (FOTO Antara News Bali/ Pande Yudha/2021)

DINAS Perhubungan Kabupaten Tabanan, Bali, meluncurkan sistem pengujian kendaraan bermotor secara "Blue Card" (Bukti Lulus Secara Elektronik) di Kantor Dinas Perhubungan setempat (19/1/2021).

Kadishub Tabanan Ngurah Darma Utama dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, mengatakan pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem SIM PKB atau bukti lulus secara elektronik ini harus diterapkan.

Hal itu sesuai dengan amanat dari undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan, Permenhub Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang mulai tahun 2021 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Wajib melaksanakan pengujian dengan sistem ini.

"Apabila tidak melaksanakan pengujian dengan SIM PKB, maka Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dilarang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Ini dapat mengakibatkan masyarakat menjadi kesusahan dan jauh, karena untuk melakukan pengujian hanya dapat dilaksanakan di daerah yang memenuhi standar terakreditasi secara E-Blue Card," ujarnya.

Menurut dia, keunggulan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan dengan sistem ini,

diantaranya memenuhi keinginan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, terpenuhi kelaikan jalan dari kendaraan wajib uji, memudahkan monitoring, pengawasan dilapangan, serta pengujian menjadi lebih cepat.

"Perlu kami sampaikan, kendaraan wajib uji di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 sejumlah 10.047 kendaraan. Dengan jumlah yang besar ini dapat menjadi potensi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Tabanan," katanya.

Sementara itu, Sekda I Gede Susila, mengatakan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara "Blue Card" merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak kecelakaan yang memiliki efek negative yang bersifat jangka panjang. Mulai dari kerugian materiil, hilangnya nyawa serta dampak lainnya berupa kemacetan lalu lintas. (ant)

Pemkab Klungkung Panen Perdana Padi Varietas M70D

WAKIL Bupati Klungkung I Made Kasta didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Ida Bagus Juanida melakukan panen perdana padi varietas benih padi M70D (Moeldoko 70 Day) di Subak Kawan, Desa Selisihan, Klungkung, Bali, Senin.

Panen perdana Padi M70D itu dihadiri pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Provinsi Bali, HKTI Kabupaten Klungkung beserta jajaran dan para petani Subak Selisihan Kawan Desa Selisihan.

Ketua DPD HKTI Bali Provinsi Bali Ir. Putu Arya Sedhana menyampaikan jenis padi yang dipanen merupakan padi varietas benih padi M70D yang pertama kali diperkenalkan oleh Ketua HKTI Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko bahwa padi dengan varietas M70D bisa menghasilkan 8,8 ton dari 1 hektare sawah.

"Pada pandemi COVID-19 ini, masyarakat dapat terbantu dengan adanya Padi Varietas M70D, karena dengan hasil pertanian yang cepat dapat membantu dalam Ketahanan Pangan. Saya harapkan Pemkab Klungkung juga dapat membantu mengembangkan padi varietas M70D," kata Ir. Putu Arya Sedhana.

Ia menyatakan dengan menggunakan lahan seluas 500 are, maka diperoleh hasil gabah petani kurang lebih 8 ton. Padi varietas ini juga sudah ditanam di beberapa kabupaten di Bali, selain Klungkung, diantaranya Buleleng, Tabanan, dan Denpasar.

Salah seorang Petani Wayan Pageh menyatakan bahwa alasannya memilih untuk menanam padi M70D adalah dikarenakan dalam menanam Padi Varietas M70D dapat tahan terhadap Penyakit Blast, hama wereng, dan lainnya serta dalam penggunaan Pupuk tidak terlalu banyak. "Untuk sementara ini, saya belum menemukan kesulitan," ujar Wayan Pageh.



Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Ida Bagus Juanida melakukan panen perdana padi varietas benih padi M70D (Moeldoko 70 Day) di Subak Kawan, Desa Selisihan, Klungkung, Bali, Senin (25/1/2021) (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2021)

Dalam kesempatan itu, Wabup Kasta mengapresiasi kinerja HKTI dalam pengembangan terhadap bibit Padi Varietas M70D.

"Mudah-mudahan dengan keunggulan yang dimiliki padi Varietas M70D, petani di Desa Selisihan Kabupaten Klungkung bisa menikmati hasil dari padi Varietas tersebut, sehingga dapat menjaga Ketahanan pangan di

Indonesia," katanya.

Didampingi Kepala Dinas Pertanian Klungkung, Ida Bagus Juanida, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berharap dengan adanya jalan usaha tani untuk memperlancar mobilitas sektor pertanian, maka pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produksi pertanian akan lancar. (ant)

Pemkab Klungkung Salurkan Bantuan untuk Penyandang Disabilitas



Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta menyerahkan bantuan CSR kepada penyandang disabilitas di beberapa desa, Jumat (22/1/2021). (ANTARA/HO-Humas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung, Bali, menyalurkan bantuan yang bersumber dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) kepada penvandang disabilitas di kabupaten setempat, Jumat.

Bantuan yang diserahkan Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta itu, berupa sembako 30 paket yang dibagikan di Kecamatan Klungkung di antaranya Desa Akah 18 paket, Desa Selat, Selisihan, dan Manduang, masingmasing empat paket.

"Bantuan yang diserahkan bisa digunakan memenuhi kebutuhan keluarga penyandang disabilitas di tengah pandemi COVID-19. Bantuan CRS kali ini menyasar penyandang disabilitas. Semoga bantuan ini bisa membantu dan memenuhi kebutuhannya," katanya didampingi Camat Klungkung I Putu Arnawa.

Ia mengatakan apa yang dilakukan ini sebagai wujud perhatian untuk meringankan beban keluarga yang menyandang disabilitas, sekaligus memberi motivasi agar masyarakat tabah menghadapi cobaan ini.

"Kita Iakukan Iangkah-Iangkah riil, salah satunya dengan menyerahkan bantuan logistik untuk kebutuhan sehari-hari dan berharap bantuan yang diserahkan ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga penyandang disabilitas," kata pejabat asal Akah itu.

Salah satu penyandang disabilitas asal Banjar Bungaya, Desa Akah Wayan Tangkas menyampaikan terima kasih atas perhatian pemkab serta masyarakat yang telah membantu keluarganya.

Sebelumnya, pada Rabu (20/1), Wabup Kasta ke lokasi tanah longsor di Subak Pegending, Banjar Besang Kawan, Semara-

"Anggota dari BPBD Klungkung sudah membantu krama subak untuk membersihkan tumpukan material serumpun pohon bambu yang menutupi saluran irigasi subak tersebut," ujarnya.

Didampingi Kalak BPBD Klungkung I Putu Widiada, Lurah Semarapura Kaja I Wayan Astawa, ia mengapresiasi para petugas BPBD Klungkung yang sudah ikut bergotong-royong membantu krama subak untuk menyingkirkan material longsor.

"Mudah-mudahan proses pembersihan ini cepat selesai agar nantinya saluran irigasi ke subak bisa normal," ujarnya.

Selain itu, Wabup Kasta meninjau saluran subak pegending vang juga mengalami longsor di belakang Wantilan Taman Sari, Desa Adat Besang Kangin.

"Syukur dalam musibah longsor ini tidak ada korban jiwa, tetapi mari tetap tingkatkan kewaspadaan menjadi diri," katanya. (ant)

Bupati Karangasem Mas Sumatri Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19

BUPATI Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menjadi orang pertama di Kabupaten Karangasem yang menjalani vaksinasi atau disuntik vaksin COVID-19 Ruang Imunisasi, Puskesmas Karangasem I, Selasa.

Vaksinasi untuk mengendalikan atau memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19 itu juga diikuti dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem.

Sebelum disuntik vaksin jenis Sinovac, Bupati Mas Sumatri terlebih dahulu menjalani screening, termasuk pemeriksaan tensi darah.

"Vaksinasi justru dapat menjadi langkah tepat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Vaksinasi akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu," ujar Mas Sumatri setelah divaksin.

Mas Sumatri juga menambahkan meskipun telah melakukan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan tetap harus dilakukan.

"Baru saja saya bersama dengan anggota Forkopimda telah melakukan vaksinasi dan nantinya akan dilanjutkan kepada Tenaga Kesehatan dan pada tahap III dilanjutkan kepada kelompok masyarakat umur 18 - 59 tahun, sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah," kata Mas Sumatri.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Karangasem dr. I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan vaksin sudah ada 4.400 vial dan tiba di gudang farmasi Karangasem pada 25 Januari 2021 pukul 15.00 Wita dengan pengawalan TNI/Polri.

"Hari ini, pencanangan kick off dimulai dari Forkopimda dan tokoh masyarakat, kemudian akan didistribusikan ke 15 fasyankes yaitu 12 puskesmas, dua Rumah Sakit dan satu KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Padang Bai. Untuk tahap I vaksin akan diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang berjumlah 2.211 vial," ujarnya.

Setelah selesai tahap I, akan dilanjutkan tahap II yang diberikan kepada pelayanan publik TNI/Polri, Satpol PP dan petugas yang memberikan pelayanan



Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menjadi orang pertama di Kabupaten Karangasem yang menjalani vaksinasi atau disuntik vaksin COVID-19 Ruang Imunisasi, Puskesmas Karangasem I, Selasa (26/1/2021). (Foto Antara News Bali) HO-Humas Pemkab Karangasem/2021)

kepada masyarakat.

Tahap III kelompok masyarakat umur 18-59 tahun yang sehat yang berdasarkan NIK yang tertera di Disdukcapil dan akan mendapatkan SMS atau diinformasikan oleh Babinkamtibmas.

"Dengan vaksin ini tentunya

salah satu upaya dalam memutus mata rantai COVID-19 dan vaksin yang diberikan semua sama yaitu jenis Sinovac yang sudah diedarkan di seluruh Indonesia, jangan takut untuk divaksin, karena pelaksanaan dan pengawasannya ketat," katanya. (ant)

Bupati Jembrana Perintahkan Efisiensi Anggaran



Bupati Jembrana I Putu Artha membuka Musrenbang Kecamatan Mendoyo dengan pesan untuk melakukan efisiensi anggaran karena pendapatan daerah menurun saat pandemi Covid-19, Senin (25/1). (Antaranews Bali/Humas Jembrana/2021)

BUPATI Jembrana I Putu Artha memerintahkan dilakukan efisiensi anggaran, karena pandemi COVID-19 membawa dampak menurunnya pendapatan

"Baik pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer dari pusat mengalami penurunan. Hal tersebut karena dampak pandemi ini, makanya kita harus menggunakan anggaran yang efisien," katanya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mendovo, Senin.

Ia mengatakan, program yang diusulkan desa hingga kecamatan harus program yang benar-benar menjadi prioritas, sehingga anggaran yang ada benar-benar efektif.

Untuk desa-desa yang

wilayahnya rawan bencana, ia mengimbau, untuk mendapatkan prioritas karena dibutuhkan masvarakat.

Camat Mendovo I Putu Nova Noviana mengatakan, dari Musresbang muncul anggaran Rp162 miliar yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Jembrana.

Menurut dia, anggaran sebesar itu untuk membiayai empat bidang pembangunan yaitu infrastruktur perumahan dan lingkungan hidup, sosial budaya dan aparatur pemerintah, hukum dan HAM serta ekonomi.

Sebelum membuka musrenbang, Artha menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 yang diterima camat setempat. (ant)

Universitas Palangka Raya Kunjungi Undiksha

UNIVERSITAS Pendidikan Ganesha (Undiksha) Buleleng, Bali, menerima kunjungan dari Universitas Palangka Raya untuk melakukan studi banding tentang strategi pengusulan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) di Singaraja, Buleleng, Selasa.

Dalam rombongan Universitas Palangka Raya terdapat Direktur Pengembangan Aset, Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc., didampingi Sekretaris Dr. Roby Sambung, M.M. Kehadiran mereka diterima langsung Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut, Sudyana menyampaikan peningkatan status dari Satuan Kerja (Satker) ke PK-BLU telah menjadi target dari Universitas Palangka

Raya sejak beberapa tahun lalu. Guna memuluskan itu, pihaknya menggali informasi ke Undiksha yang dinilai memiliki karakteristik yang sama. "Kehadiran kami ke Undiksha ingin sharing tentang hal apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi PK-BLU," katanya.

Pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi berbagai indikator, salah satunya melakukan penataan aset. Informasi yang didapatkan dari Undiksha akan dijadikan acuan dalam melakukan penyempurnaan.

Sementara itu, Rektor Undiksha Prof. Jampel mengatakan kunjungan dari Universitas Palangka Raya ini tidak hanya sebagai media silaturahmi, namun juga bentuk kepercayaan terhadap Undiksha. Ia menyampaikan untuk mewujudkan Undiksha sebagai PK-BLU sejak tahun 2012 dan akhirnya disetujui tahun 2015, yang diperlukan tidak terbatas pada pengajuan proposal, tetapi juga didukung sumber daya



Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Buleleng, Bali, menerima kunjungan dari Universitas Palangka Raya untuk melakukan studi banding tentang strategi pengusulan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) di Singaraja, Buleleng, Selasa (26/1/2021). (Foto Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

manusia yang dimiliki maupun sumber-sumber pendapatan.

"Untuk menjadi PK-BLU, kita harus mampu mandiri. Ini yang perlu disiapkan," jelasnya.

Wakil Rektor Undiksha, Prof. Lasmawan menegaskan minimal ada empat aspek yang harus disiapkan secara serius dalam pengusulan menjadi PK-BLU, yaitu, existing modalitas kelembagaan, renstra sumber daya, rencana bisnis dan anggaran, serta struktur tata kelola yang diharapkan setelah perubahan itu terjadi, termasuk sumber pembiayaannya. Selain itu juga adanya perbaikan tata kelola aset sebagai sumber pendapatan.

"Kami rasa Universitas Palangka Raya bisa mewujudkan ini," ucapnya. (ant)

2020, Ombudsman Bali Terima 70 Pengaduan Masyarakat



Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab. (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2021)

KEPALA Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan pihaknya selama tahun 2020 menerima 70 pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik.

"Pengaduan ke Ombudsman mengalami penurunan cukup signifikan pada 2020. Ini bisa dimaklumi karena situasi pandemi COVID-19," kata Umar saat ditemui di Kantor Ombudsman Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa.

Berdasarkan data Ombudsman Bali, pada 2017 ada 170 pengaduan, 2018 sebanyak 129 pengaduan, 2019 ada 97 pengaduan dan 2020 sebanyak 70 pengaduan.

Selain karena pandemi, penurunan juga disebabkan karena

pemerintah daerah telah mewadahi aduan masyarakat melalui kanal pengaduan yang telah disediakan. Kanal pengaduan yang dimiliki masing-masing pemda berfungsi secara efektif menerima pengaduan masyarakat terutama di masa pandemi ini.

"Situasi pandemi ini yang memengaruhi tingkat pengaduan masyarakat yang naik turun. Namun, itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa kami mengalami penurunan kinerja, ini masalah situasi. Kami terus melakukan pengawasan tanpa ada pengaduan dari masyarakat. Tahun ini, kami dorong lagi agar publik lebih aktif melaporkan adanya maladministrasi ke Ombudsman," jelasnya.

Umar mengatakan sektorsektor yang dominan menjadi bahan pengaduan ke Ombudsman selama tahun 2020 yaitu sektor pertanahan dan pendidikan. Sektor pendidikan memiliki tingkat aduan yang cukup tinggi karena

dipengaruhi oleh adanya perubahan sistem pendidikan.

"Meskipun di sektor pendidikan masih ditemukan ada debat tentang zonasi. Ya karena itu sistem yang baru tentu butuh adaptasi sehingga masih ada beberapa kendala terkait hal tersebut," katanya.

Hingga saat ini, kata Umar, semua pelaporan yang masuk ke Ombudsman bisa diselesaikan meskipun membutuhkan waktu yang tidak cepat. Adapun waktu tenggang dalam penyelesaian aduan tersebut di antaranya 60 hari untuk laporan ringan, 90 hari untuk laporan sedang dan 120 hari untuk laporan berat.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan maladministrasi pelayanan publik dapat mengakses email, telepon, whatsapp, termasuk melalui website, jadi tidak wajib mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali.

BI Bali Dukung UMKM Mantapkan Digitalisasi Lewat Gerakan Nasional BBI

antor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2021, sekaligus mendorong UMKM untuk terus memantapkan digitalisasi dari hulu hingga hilir.

"Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan selesai, sehingga kami terus berusaha mendorong digitalisasi dan mari jadikan sebagai tahun UMKM," kata Kepala Perwakilan BI (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho di sela-sela acara peluncuran Gernas BBI 2021 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, di Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Dalam Gernas BBI 2021 yang secara resmi diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual itu, dia mengemukakan sejumlah UMKM binaan KPwBI Bali berhasil terpilih menampilkan "showcase"nya untuk kategori produk premium dan nonpremium.

"Dari 10 UMKM yang produknya masuk produk premium, enam

di antaranya merupakan UMKM binaan KPwBI Bali. Demikian juga dari 16 kategori produk nonpremiun, tujuh di antaranya juga UMKM binaan KPwBI Bali. Jadi kita ajukan 13 UMKM, kesemuanya lolos kurasi," ucapnya.

Di lokasi peluncuran Gernas BBI 2021 terdapat "showcase" 26 UMKM yang berasal dari UMKM binaan KPwBI Provinsi Bali, UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Badung, dan Gianyar, serta UMKM Debitur BCA.

Adapun 10 UMKM dengan produk premium, yaitu untuk Din'zhandmad, WH Bali, Bara Silver, Kutus-Kutus, Kue Saje, Ma Ira, Kopi Arabika Kintamani, Putrimas, Kelompok Pertenunan Artha Dharma dan Agung Bali Collection, sedangkan 16 UMKM dengan kategori produk nonpremium, yaitu



Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat menunjukkan cara bertransaksi menggunakan QRIS kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam acara peluncuran Gernas BBI (Antaranews Bali/HO-BI Bali/2021)

Rupadana Silver, Bali Bakti Anggara, Pia Cinta, UD Arya Paramita, Sambal Khas Karangasem, Klaster Bawang Merah Songan, Kopi Giri Alam, Kou Bali & Kou Cuisine, Gula Pedawa, Bali Pure, Poni Songket, Marta Ayu, Anacaraka, Pagi Motley, Cepuk Rang-Rang Nusa Karang, Murni Cosmetic.

"Astungkara (atas izin Tuhan, red.) UMKM binaan KPwBI Bali

sudah di-'onboarding', telah dilatih cara pengambilan foto, cara buat laporan keuangan, cara buat inovasi, dapat menampilkan keunikan dan sebagainya," ujarnya.

Trisno menambahkan digitalisasi yang didorong tidak hanya untuk pemasaran, tetapi juga mulai dari hulu atau proses produksi, kelembagaan, pembiayaan hingga hilirisasi produk. (ant)

BPJAMSOSTEK Denpasar Santuni Rp1,5 miliar ke Ahli Waris Tenaga Kerja Meninggal



Acara penyerahan santunan dari BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar kepada Herni Lengkeng selaku istri dari Stanley Robert Dodi (alm) yang meninggal karena kecelakaan kerja (Antaranews Bali/HO-BPJAMSOSTEK/2021)

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bali Denpasar menyerahkan santunan untuk ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan nilai santunan Rp1,5 miliar lebih.

"Kami turut berduka atas meninggalnya peserta BPJAMSOSTEK

kepada ahli waris. Walaupun santunan yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK tidak bisa menggantikan almarhum, tetapi setidaknya santunan ini dapat membantu keluarga yang ditinggalkan," kata Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa) Deny Yusyulian di Denpasar, Senin (25/1).

Deny Yusyulian menyerahkan simbolis santunan tersebut kepada Herni Lengkeng selaku istri dari Stanley Robert Dodi (alm) yang sebelumnya bekerja di PT Jasa Angkasa Semesta

"Sesuai dengan misi BPJAM-SOSTEK adalah melindungi seluruh pekerja dan keluarganya, maka BPJAMSOSTEK hadir untuk seluruh pekerja di Indonesia,"

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar Mohamad Irfan mengatakan almarhum merupakan karyawan dari PT Jasa Angkasa Semesta, perusahaan tersebut merupakan kepesertaan dari luar Bali.

"Itu artinya seluruh peserta BPJAMSOSTEK dapat mengajukan klaim di cabang manapun di seluruh Indonesia. Kami tetap mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh peserta," ujarnya.

Irfan menambahkan, almarhum

mengalami kecelakaan dalam perjalanan saat berangkat kerja menuju ke kantor tanggal 22 Juli 2020 yang mengakibatkan cedera kepala berat.

Setelah mengalami perawatan di ICU RSU Kasih Ibu Denpasar selama kurang lebih tiga bulan, Stanley meninggal dunia pada 15 Oktober 2020. Selama dirawat di rumah sakit, almarhum tidak sadarkan diri atau dalam kondisi koma.

BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar telah membayarkan total santunan kepada ahli waris sebesar Rp1.516.088.674 dengan rincian Santunan Kematian sebesar Rp354.880.000, Jaminan Hari Tua sebesar Rp159.654.940, biaya pengobatan selama di Rumah Sakit sebesar Rp981.904.567, Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar Rp19.649.167, serta santunan berkala yang didapatkan ahli waris setiap bulannya sebesar Rp 591.060. (ant)